

**PERAN NGO: INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE (IGJ)
DALAM MERESPON ISU KEBIJAKAN SUBSIDI
PERIKANAN DI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
TAHUN 2020-2021**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

KINANTI TAMARA 07041181823030

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN NGO: INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE DALAM
MERESPON ISU KEBIJAKAN SUBSIDI PERIKANAN DI
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TAHUN 2020-2021**

SKRIPSI

Disusun oleh:

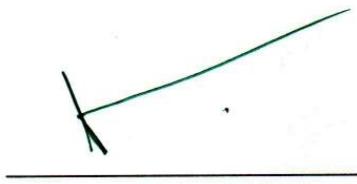
Kinanti Tamara

07041181823030

Telah disetujui oleh dosen pembimbing, 28 Juni 2022

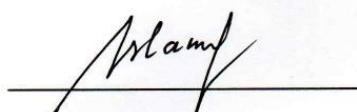
Pembimbing 1

Dr. Andries Lionardo,S.IP.,M.Si
NIP. 197905012002121005



Pembimbing 2

Nur Aslamiah Supli,BIAM.,M.Sc
NIP. 199012062019032017



Disetujui oleh,

Ketua Program Studi,


Sofyan Efendi,S.IP.,M.Si
NIP.197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“Peran NGO: Indonesia for Global Justice dalam Merespon Isu Kebijakan Subsidi perikanan di World Trade Organization (WTO) tahun 2020-2021”

Skripsi

Oleh :

Kinanti Tamara

07041181823030

Telah dipertahankan di depan penguji dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 21 Juli 2022

Pembimbing :

1. Dr. Andries Lionardo,S.IP.,M.Si
NIP. 197905012002121005

2. Nur Aslamiah Supli,BIAM.,M.Sc
NIP. 199012062019032017

Tanda Tangan



.....
19/08/2022

Penguji :

1. Gunawan Lestari Elake,S.IP.,MA
NIP.198405182018031001

2. Indra Tamsyah,S.IP.,M.Hub.Int
NIDN.0025058808

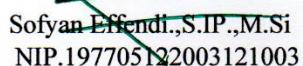
Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof.Dr. Alfitri, M.Si
NIP.196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional,



Sofyan Effendi.,S.IP.,M.Si
NIP.197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kinanti Tamara
NIM : 07041181823030
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Peran NGO: Indonesia For Global Justice Dalam Merespon Isu Kebijakan Subsidi Perikanan Di World Trade Organization (WTO) Tahun 2020-2021*" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 22 Juni 2022



Yang membuat pernyataan,

Kinanti Tamara
NIM.07041181823030

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang telah bersusah payah memenuhi segala kebutuhan materi selama perkuliahan dan membanggakan mereka karena anaknya telah berhasil menjadi seorang sarjana. Tentu saja skripsi ini dipersembahkan untuk diri sendiri yang telah melewati segala proses dan air mata.

Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk yang selalu bertanya “kapan skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib, alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

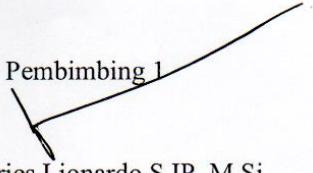
ABSTRAK

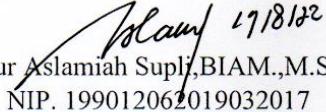
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Indonesia for Global Justice (IGJ) dalam merespon isu kebijakan subsidi perikanan di *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2020-2021. Dengan menggunakan teori peran *Non-Government Organization* (NGO) dari David Lewis dan Nazneen Kanji dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penulis menemukan peranan IGJ adalah (1) sebagai *Implementer* (Pelaksana) IGJ menjalankan program yang melakukan sosialisasi mengenai subsidi perikanan kepada nelayan di Indonesia (2) sebagai *Catalysts* (katalis) IGJ memfasilitasi berbagai diskusi, melakukan advokasi, kampanye, serta pengawasan terhadap isu kebijakan subsidi perikanan di WTO (3) sebagai *Partnership* (Kerjasama) IGJ melakukan kerjasama dengan berbagai NGO, INGO, serta Kementerian Luar Negeri. Dari hasil ini penulis menyimpulkan IGJ telah melakukan perannya sebagai NGO yang telah memenuhi tiga peran utama NGO dalam merespon isu kebijakan subsidi perikanan di WTO.

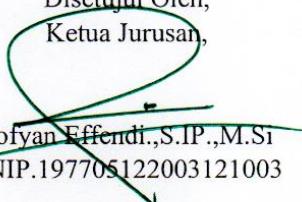
Kata kunci: *IGJ, WTO, Subsidi Perikanan, Implementers, Catalysts, dan Partner.*

Indralaya, 21 Juli 2022

Pembimbing 1
Dr. Andries Lionardo,S.IP.,M.Si
NIP. 197905012002121005

Mengetahui,


Pembimbing 2
Nur Aslamiah Supli,BIAM.,M.Sc
NIP. 199012062019032017


Disetujui Oleh,
Ketua Jurusan,
Sofyan Effendi.,S.IP.,M.Si
NIP.197705122003121003


ABSTRACT

This study aims to see how the role of Indonesia for Global Justice (IGJ) in responding to the issue of fisheries subsidy policies in the World Trade Organization (WTO) in 2020-2021. By using the theory of the role of Non-Government Organizations (NGOs) from David Lewis and Nazneen Kanji with in-depth interview data collection techniques and literature studies. The author finds the role of the IGJ is (1) as Implementer IGJ runs a program that disseminates the issue of fisheries subsidy policies in the WTO to fishermen in Indonesia (2) as Catalysts The IGJ facilitates various discussions, advocates, campaigns, and watchdog of fisheries subsidy policy issues at the WTO (3) as a Partner IGJ collaborates with various NGOs, INGO, as well as the Ministry of Foreign Affairs. From these results, the author concludes that IGJ has performed its role as an NGO that has fulfilled the three main roles of NGOs in responding to the issue of fisheries subsidy policies in the WTO.

Keywords: *IGJ, WTO, Subsidi Perikanan, Implementers, Catalysts, dan Partner.*

Indralaya, 21 Juli 2022

Mengetahui,
Pembimbing 1 /
Dr. Andries Lionardo,S.IP.,M.Si
NIP. 197905012002121005

Pembimbing 2
Mlaamp 19/8/22
Nur Aslamiah Supli,BIAM.,M.Sc
NIP. 199012062019032017

Disetujui Oleh,
Ketua Jurusan,
Sofyan Effendi.,S.IP.,M.Si
NIP.197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disamping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Universitas Sriwijaya terkhususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
2. Indonesia for Global Justice sebagai tempat pelaksanaan penelitian penulis yang telah memberikan semua data kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional Bapak Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si beserta seluruh staffnya.
4. Bapak Dr.Andries Lionardo,S.IP.,M.Si dan Ibu Nur Aslamiah Supli,BIAM.,M.Sc yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ibu dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Serta admin Jurusan mba Siska dan mas Dimas yang telah membantu menyelesaikan segala administrasi penulis selama berkuliahan dan pendaftaran sidang.

6. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda Sapri Andi dan Ibunda Evi Mulya serta adik penulis. atas segala dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Dan orang-orang yang telah menemani selama perkuliahan di Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Indralaya, 1 Agusutus 2022

Kinanti Tamara
07041181823030

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kerangka Teori	16
2.3 Alur Pemikiran.....	19
2.4 Argumentasi Utama	19
BAB III	20
METODE PENELITIAN	20
3.1 Desain Penelitian	20
3.2 Definisi Konsep.....	20
3.2.1 Peran	20

3.3 Fokus Penelitian	20
3.4 Unit Analisis.....	22
3.5 Jenis dan Sumber Data	23
3.5.1 Jenis Data	23
3.5.2 Sumber Data	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6.1 Penentuan Informan	24
3.6.2 Jenis Informan.....	24
3.7 Teknik Keabsahan Data	25
3.7.1 Triangulasi	25
3.7.2 Member Check	26
3.8 Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV.....	28
GAMBARAN UMUM	28
4.1 Indonesia for Global Justice	28
4.1.1 Sejarah Indonesia for Global Justice	28
4.1.2 Visi dan Misi IGJ.....	28
4.1.3 Logo IGJ	29
4.1.4 Tujuan IGJ	29
4.1.5 Lingkup Kerja IGJ.....	30
4.2 Subsidi Perikanan.....	32
4.3 World Trade Organizations	33
BAB V	34
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
5.1 Peran Implementer.....	34
5.1.1 Sosialisasi Rencana Penghapusan Subsidi Perikanan di WTO.....	35
5.2 Peran Catalysts	40
5.2.1 FGD Bersama Nelayan Indonesia	40
5.2.2 Mengadakan Audiensi: Diskusi Langsung Dengan Pemerintah Indonesia	44
5.2.3 Melakukan Kampanye Melalui Media Sosial.....	47
5.2.4 Riset dan Publikasi.....	52
5.2.5 Aksi Kolektif: Pernyatan Sikap IGJ dan NGO Lainnya.....	55
5.2.6 Membuat Naskah Kebijakan Subsidi Perikanan.....	58
5.3 Peran Partnership	61
5.3.1 Kerjasama Dengan NGO Lainnya dan Membuat Koalisi.....	61

5.3.2 Kerjasama Dengan Kementerian Luar Negeri RI	65
5.3.3 Kerjasama Dengan Pacific Network on Globalizations (PANG)	66
BAB VI.....	68
PENUTUP.....	68
 6.1 Kesimpulan	68
 6.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DOKUMENTASI BERSAMA IGJ	75
DOKUMENTASI BERSAMA KNTI	76
DOKUMENTASI BERSAMA KIARA	77
PANDUAN WAWANCARA IGJ	78
PANDUAN WAWANCARA KIARA	80
PANDUAN WAWANCARA KNTI	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Negara Pemberi Subsidi Besar 2018 (USD billions)	2
Tabel 1.2 Jenis-Jenis Subsidi Perikanan oleh Pemerintah Indonesia	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Table 3.1 Fokus Penelitian	20

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pemikiran	19
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo IGJ	29
Gambar 5.1 Postingan Sosialisasi IGJ	36
Gambar 5.2 Dokumentasi FGD Pada Bulan September	42
Gambar 5.3 Flyer Diskusi Rakyat	46
Gambar 5.4 Unggahan IGJ Menggunakan Tagar #fisherissubsidies	49
Gambar 5.5 Tampilan Laman Utama Website IGJ	52
Gambar 5.6 Publikasi IGJ di Instagram	54
Gambar 5.7 Unggahan IGJ sedang berada di KTM-12 di Jenewa	60
Gambar 5.8 Dokumentasi Pertemuan IGJ dan PANG	67

DAFTAR SINGKATAN

IGJ	: <i>Indonesia for Global Justice</i>
INFID	: <i>International NGO Forum on Indonesian Development</i>
INGO	: <i>International Non-Government Organization</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
NGO	: <i>Non-Government Organization</i>
KIARA	: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
KTM	: Konferensi Tingkat Menteri
KNTI	: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
NGO	: <i>Non-Government Organization</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDT	: <i>Special and Differential Treatment</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan 75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan zaman peran aktor non-negara dalam konstelasi perdagangan global menjadi isu yang cukup penting untuk dikaji. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa aktor non-negara memiliki dampak cukup signifikan dalam hubungan internasional, semula yang hanya didominasi oleh negara telah memungkinkan kelompok *civil society* mengambil peran penting dalam merespon suatu isu global (Scholte, 2002). Hal ini tentu saja bahwa aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah (NGO) memiliki potensi untuk terlibat dan mengambil peran terkait permasalahan global. Menurut Jan Aart Scholte, kehadiran *civil society* mampu mendorong proses pengambilan keputusan yang tidak sekedar mempertimbangkan kepentingan negara, namun juga mampu memperhatikan kepentingan masyarakat sipil. Merujuk kepada pendapat para teoritis di atas, dapat dikatakan bahwa *civil society* memiliki potensi untuk terlibat dalam mengatasi permasalahan global pada tingkatan tata kelolanya.

Permasalahan yang sedang dihadapi dalam konstelasi perdagangan global adalah terkait kebijakan subsidi perikanan di WTO. Subsidi perikanan merupakan tindakan atau kelambanan pemerintah yang spesifik untuk industri perikanan dalam meningkatkan keuntungan industri dalam jangka pendek, menengah dan Panjang. Menurut WTO, subsidi merupakan “kontribusi keuangan” oleh pemerintah atau badan publik yang memberikan manfaat kepada sektor swasta melalui transfer dana, termasuk: hibah, pinjaman dan ekuitas dalam fusi atau transfer dana potensial seperti jaminan pinjaman, pembebasan pajak, barang dan jasa yang disediakan untuk sektor swasta selain

infrastruktur umum, dukungan tidak langsung melalui pembayaran pemerintah ke dalam mekanisme pendanaan. segala bentuk pendapatan atau dukungan harga. Negosiasi subsidi perikanan pertama kali diluncurkan pada konferensi tingkat menteri di Doha pada tahun 2001 (WTO, 2017). Seiring dengan berjalannya kebijakan subsidi perikanan ini pada praktiknya beberapa bentuk subsidi perikanan yang diberikan berpotensi *overfishing* dan *overcapacity*.

Tabel 1.1 Daftar Negara Pemberi Subsidi Besar 2018 (USD Billions)

Country	Beneficial	Capacity-enhancing	Ambiguous	Total
China	434	5,886	941	7,261
EU	1,523	2,036	244	3,803
USA	2,187	1,136	106	3,429
Korea Rep.	1,635	1,500	50	3,185
Japan	534	2,111	215	2,860
Russian	295	1,162	54	1,512
Thailand	74	1,069	6	1,149
Canada	388	194	271	853
Norway	278	527	41	846
Spain	150	683	11	844
Taiwan	69	708	10	787

Sumber. jurnal Marine Policy 2019

Update Estimates And Analysis Of Global Fisheries Subsidies

Tabel 1.1 menunjukkan perkiraan subsidi yang diberikan oleh negara penangkap ikan bersubsidi terbesar di negara-negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi pada tahun 2018. Dari data tersebut ada 5 negara yang memberikan subsidi besar, negara tersebut diantaranya ada China, Uni Eropa, Amerika Serikat, Republik Korea dan Jepang. China memberikan subsidi dengan jumlah subsidi sebesar USD 7,2 miliar. Kemudian disusul oleh EU sebesar USD 3,8 miliar, Amerika Serikat sebesar USD 3,4 miliar, Republik Korea sebesar USD 3,1 miliar, dan Jepang USD 2,8 miliar. Negara ini memberikan subsidi dengan angka rata-rata USD 22,2 miliar per tahun atau 64% dari

total global untuk subsidi perikanan (Sumaila, 2019) subsidi yang banyak diberikan pada peningkatan kapasitas. Angka yang terbilang cukup besar dalam aktivitas yang merusak keberlanjutan ekosistem laut dan tindakan ilegal di laut, serta berpotensi *overfishing* dan *overcapacity*.

Dengan adanya subsidi perikanan yang berpotensi *overfishing* dan *overcapacity*, maka pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 yang seharusnya dilaksanakan pada 2020, namun karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan KTM diundur dan akan dilaksanakan pada 30 November-3 Desember 2021 di Jenewa (kemlu, 2021) akan tetapi pelaksanaan ini ditunda Kembali sampai waktu yang belum ditentukan (WTO, 2021). Pada KTM direncanakan Akan membahas terkait subsidi perikanan, dimana pada *draft text* terbaru ada 8 jenis subsidi perikanan yang akan dihapuskan karena berkontribusi bagi *overfishing* dan *overcapacity* (WTO, 2021).

Adapun 8 jenis subsidi perikanan yang akan dihapuskan, yaitu:

1. Subsidi untuk konstruksi, akuisisi, modernisasi, renovasi atau perbaikan kapal;
2. Subsidi untuk pembelian mesin dan peralatan kapal (termasuk alat dan mesin penangkap ikan, mesin pengolah ikan, teknologi pencarian ikan, lemari es, atau mesin untuk menyortir atau membersihkan ikan);
3. Subsidi untuk pembelian/biaya bahan bakar, es, atau umpan;
4. Subsidi untuk biaya pegawai, retribusi sosial, atau asuransi;
5. Dukungan pendapatan kapal atau operator atau pekerja yang mereka pekerjakan;
6. Dukungan harga ikan yang ditangkap;
7. Subsidi untuk dukungan di laut; dan
8. Subsidi yang menutupi kerugian operasi kapal atau penangkapan ikan atau kegiatan terkait penangkapan ikan.

Namun, dalam *draft text* subsidi perikanan WTO ini yang diluncurkan pada tahun 2020 dan sampai peluncuran revisi *draft text* terbaru pada 8 November 2021 ini tidak ada pengecualian bagi nelayan skala kecil dan tradisional di negara berkembang. Ini akan berdampak pada pemberian subsidi yang telah dilakukan Pemerintah di negara berkembang kepada nelayan kecil, karena adanya ketentuan *Special and Differential Treatment* (SDT).

Melihat praktik pemberian subsidi di Indonesia. Pemerintah memberikan enam jenis subsidi di sektor perikanan yang dilaporkan kepada WTO (WTO, 2020) dapat dilihat pada tabel 1.2. Enam jenis subsidi perikanan yang diberikan secara periodik dan belum tentu setiap tahunnya tersedia.

Tabel 1.2 Jenis-Jenis Subsidi Perikanan oleh Pemerintah Indonesia

Jenis Subsidi	Kegunaan/Tujuan	Otoritas Pemberi Subsidi	Total Angka (Nominal) / Periode
National Fish Logistic System	1. Untuk menjaga kualitas ikan. 2. Memperkuat distribusi, ketersediaan, dan aksesibilitas ikan untuk konsumsi lokal.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	413,5 Miliar / 2015-2018
The Empowerment of Community Salt Companies Program	1. Meningkatkan kesejahteraan petani garam; 2. Meningkatkan produktivitas dan kualitas garam; 3. Meningkatkan keterampilan petani garam.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	113 Miliar / 2014
The Development of Community	1. Meningkatkan kesejahteraan petani garam;	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	342 Miliar / 2015 -2018

Salt Companies Program	2. Meningkatkan produktivitas dan kualitas garam; 3. Meningkatkan keterampilan petani garam.		
The Fishing Ship Vessels Construction Program	1. Peningkatan kesejahteraan nelayan kecil dengan modal usaha terbatas; 2. Memberikan akses untuk memanfaatkan potensi sumber daya ikan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	550 Miliar / 2015 - 2018
The Rural Business Development Program	Program subsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar yang memiliki keterbatasan untuk meningkatkan kapasitas usahanya.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	1,7 Triliun / 2011 - 2013
Fisheries Insurance	1. Memperkenalkan manfaat asuransi awak kapal mengenai perlindungan risiko kecelakaan penangkapan ikan di laut; 2. Untuk meningkatkan kesadaran bagi nelayan tentang pentingnya asuransi; 3. Untuk mendorong asuransi diri.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	183 Miliar / 2016 – 2018

Sumber. Laporan subsidi Pemerintah Indonesia ke WTO

Pemberian subsidi perikanan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dapat terhalang implementasinya apabila negosiasi di WTO melegitimasi pelarangan bahkan penghapusan subsidi perikanan. Padahal, sejatinya subsidi perikanan merupakan amanat konstitusi khususnya Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Tidak hanya melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, lebih jauh akan merugikan nelayan kecil dan tradisional Indonesia sebanyak 2,7 juta itu (kiara, 2015).

Dalam menanggapi hal tersebut tidak luput dari pengawasan yang melibatkan banyak aktor terutama para aktor non-negara yang memiliki kepentingan untuk kesejahteraan nelayan-nelayan kecil. Disini pentingnya peran organisasi non-pemerintah (NGO) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu subsidi perikanan dan dampaknya bagi mereka. Sehingga adanya forum antara pemerintah dan NGO untuk membahas terkait kebijakan subsidi perikanan ini. Salah satu aktor non-negara tersebut adalah Indonesia for Global Justice (IGJ), yang dahulunya *Institute for Global Justice* dibentuk pada 7 Agustus 2001 untuk mengatasi isu mengenai masalah liberalisasi perdagangan global. Dikutip dari pasal 6 AD/ART IGJ terdapat tujuan dari adanya IGJ yaitu karena berkembangnya kesadaran kritis masyarakat terhadap globalisasi, adanya tatanan dunia baru yang berdasarkan pluralism, keragaman, keberlanjutan dan keadilan. Indonesia for Global Justice (IGJ) sebagai organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu globalisasi termasuk mengawal perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan Pemerintah Indonesia. Lembaga ini memfasilitasi transformasi sosial melalui riset, advokasi dan pendidikan. Pembentukan IGJ difasilitasi oleh *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) dan juga oleh beberapa individu anggota koalisi LSM Indonesia tentang WTO (KOP-WTO). IGJ terdaftar sebagai Asosiasi dengan

Registrasi Notaris No. 34 tertanggal 22 April 2002. IGJ memiliki banyak divisi dengan berbeda bidang kajian seperti divisi isu Kesehatan, isu perburuhan dan salah satu divisi yang memiliki fokus untuk mengkaji terkait isu pertanian dan pangan (IGJ, 2017). Dimana pada divisi pertanian dan pangan IGJ bergerak pada salah satu isu yaitu isu kebijakan subsidi perikanan, isu-isu terkait subsidi perikanan tentu menjadi perhatian bagi organisasi ini.

Lantas bagaimana bentuk peran Indonesia for Global Justice (IGJ) sebagai *Non-Government Organization* (NGO) yang ada di Indonesia dalam merespon isu-isu internasional terutama pada isu kebijakan subsidi perikanan yang dirasa akan merugikan nelayan-nelayan kecil dan tradisional di negara berkembang. Serta dimensi apa saja yang dapat dipengaruhi dari keterlibatan tersebut. Hal ini menjadi landasan yang menarik untuk diteliti oleh penulis untuk melihat terutama pada aspek peningkatan peran aktor-aktor non negara yang cukup berkembang pada saat ini, serta masih kurangnya penelitian yang membahas terkait peran *Non-Government Organization* (NGO) dalam merespon isu-isu internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Indonesia for Global Justice merespon isu kebijakan subsidi perikanan di WTO pada tahun 2020-2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

- Menganalisis peran Indonesia for Global Justice (IGJ) dalam merespon isu internasional.
- Dapat mengetahui fungsi apa saja yang telah dijalankan oleh IGJ sebagai salah satu NGO di Indonesia.

- Dapat mengetahui dimensi apa saja yang bisa dipengaruhi oleh Indonesia for Global Justice (IGJ)
- Dapat menjelaskan keterkaitan antara teori NGO terhadap peran yang dilakukan oleh IGJ dalam merespon isu subsidi perikanan di WTO.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu pengetahuan yang baru mengenai peran NGO yang ada di Indonesia dalam menanggapi isu-isu yang berada di Internasional sehingga pembaca akan mengetahui lebih dalam serta bisa menjadikan ini sebagai rujukan lebih lanjut dimasa yang akan datang. Dan juga diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang merujuk pada isu terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi peneliti agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu yang di dapat semasa kuliah dengan melakukan penelitian untuk menyelesaikan Pendidikan. Serta penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian dimasa yang akan datang. Dan juga diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai *Non-Government Organization* (NGO).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. &. (2006). NGOs in International Politics. boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Bakri, U. S. (2017). *metode penelitian hubungan internasional*. Yogyakarta: pustaka penerbit.
- David Lewis, N. K. (2009). *Non Governmental organizations and development*. Newyork: Routledge.
- IGJ. (2017). *Profil IGJ*. Dikutip dari Indonesia for Global Justice: igj.or.id
- IGJ. (2020). *Dampak Penghapusan Subsidi Perikanan bagi Nelayan Indonesia*. Jakarta: IGJ.
- IGJ. (2020). *Pernyataan Sikap Nelayan Indonesia*. Dikutip dari Indonesia for Global Justice: <https://igj.or.id/nelayan-indonesia-menolak-rencana-pencabutan-subsidi-perikanan-di-wto/>
- IGJ. (2021). *Rekomendasi Kebijakan Subsidi Perikanan di Indonesia*. Jakarta: IGJ.
- IGJ. (2021). *Update Posisi Indonesia dalam Negosiasi Subsidi Perikanan di WTO*. Jakarta: IGJ.
- IGJ. (2022). tentang IGJ Dikutip dari <https://igj.or.id/tentang-kami/>
- Intan. (2022, Mei 10). Bentuk kerjasama KNTI dengan IGJ. (K. Tamara, Interviewer)
- kemlu. (2021, September 6). *Indonesia kedepankan kepentingan nelayan kecil dalam perundingan subsidi perikanan di WTO*. Dikutip dari Kementerian luar negeri RI: kemlu.go.id

kiara. (2015, Agustus 26). *memandirikan nelayan.* Dikutip dari kiara.or.id: <http://www.kiara.or.id/2015/08/26/memandirikan-nelayan/>

KIARA. (2022). *Profile KIARA.* Dikutip dari KIARA Indonesia: <https://www.kiara.or.id/>

KNTI. (2020). *Profile KNTI.* Dikutip dari KNTI-Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia: <https://knti.or.id/>

Lopez, A. R. (2014). The Impact of Social Media on Social Movements. *Journal Public Research.*

Margaret P. Karns, K. A. (2015). *international organizations: the politic and Processes of global governance.* boulder, CO: Lynne Rienner.

PANG. (2022). *Profile Pacific Network on Globalisations.* Dikutip dari Pacific Network on Globalisations: <https://pang.org.fj/about-us/>

Rusmanto, J. (2013). *Gerakan sosial: Sejarah dan Perkembangan Teori antara Kelemahan dan Kekuatan.* Palangkaraya: Zifatama Publishing.

Scholte, J. (2002). civil society and democracy in global governance. *global governance* , 281-304.

Sidik, R. M. (2022, Maret 28). wawancara penelitian mengenai respon IGJ terhadap rencana penghapusan subsidi perikanan. (K. Tamara, Interviewer)

SNI. (2022). *Profile Serikat Nelayan Indonesia.* Dikutip dari Serikat Nelayan Indonesia: <https://sni.or.id/tentang-sni>

sugiyono. (2007). *metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D.* bandung: elfabeta.

Sumaila, U. (2019). update estimates and analysis of global fisheries subsidies. *Marine Policy*, 7.

Tarrow, S. G. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politic*. New York: Cambridge University Press.

Torang, S. (2014). *Organisasi dan manajemen (perilaku,struktur,budaya & perubahan organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

WTO. (2017). *the rules of negotiation fisheries subsidies*. Dikutip dari world trade organization: https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/fish_e.htm.

WTO. (2020). *dokumen G/SCM/N/343/IDN*. Retrieved from world trade organization: wto.org

WTO. (2021). *draft text WTO Fisheries Subsidies*. Dikutip dari world trade organization: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/TN/RL/W276R2.pdf&Open=True>

WTO. (2021, November 26). *General Council decides to postponed MC12 indefinitely*. Dikutip dari World Trade Organization: https://www.wto.org/english/news_e/news_e.htm

WTO. (2022, Juni). *12th Ministerial Conference*. Dikutip dari World Trade Organizations: https://www.wto.org/english/news_e/archive_e/mc12_arc_e.htm

WTO. (2022). *profile WTO*. Dikutip dari World Trade Organization: <https://www.wto.org/>